OMBUDSMAN: 10 SEKOLAH RAWAN KECURANGAN

Kamis, 28 Juni 2018 - Agung Setio Apriyanto

Batam (Antaranews Kepri) - Ombudsman Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mencatat sebanyak 10 sekolah unggulan di Kota Batam rawan kecurangan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini.

"Sepuluh sekolah tersebut ditetapkan berdasarkan pantauan kita pada pelaksaaan PPDB tahun-tahun sebelumnya," kata Kepala perwakilan Ombudsman Provinsi Kepri Lagat Siadari, di Batam, Rabu.

Ombudsman, kata Lagat, akan memastikan PPDB tahun ini harus berjalan objektif, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif.

Lagat menambahkan dari catatan Ombudsman, sekolah yang rawan diantaranya SMK Negeri 2 Batam dan SMA Negeri 8 Batam.

"Sejumlah sekolah favorit juga kita lakukan pengawasan, karena sekolah favorit biasanya sering diburu peserta didik baru dan potensi kecurangan cukup tinggi," papar Lagat.

Lagat mengatakan ada beberapa sekolah yang tidak sepenuhnya menggunakan sistem zonasi dan disebut sekolah rujukan yakni SDN 006 Sekupang, SMP 3, SMP 6 dan SMP 26 Batam.

"Kita akan mengambil tiga sekolah dari setiap tingkatan sebagai sample pengawasan," ujar Lagat.

Ketiga sekolah itu lanjutnya terletak di Kecamatan Bengkong, Sekupang dan Batam Kota.

Lagat mengatakan selain turun langsung ke lapangan, pihaknya juga akan memasang spanduk di 10 sekolah yang dinikai rawan kecurangan.

"Spanduk berisi imbauan agar maayarakat melaporkan kecurangan-kecurangan yang ditemui sepanjang PPDB dan kita akan segera menindaklanjuti semua laporan yang masuk," tutur Lagat.

Selain itu Ombudsman kata Lagat akan menyurati Gubernur Kepri dan Walikota Batam agar menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mengeliminir praktek kecurangan dalam pelaksanaan PPDB.

Sehingga lanjut Lagat tidak ada maladministrasi yang terjadi sepanjang PPDB tahun ini.

Seperti yang diketahui, PPDB tingkat SMA sederajat melalui sistem online di Kepri akan mulai pada 28 Juni dan pendaftaran SMA ditutup pada 6 Juli 2018 mendatang.

Sementara SMK berakhir pada 3 Juli. Di Kota Batam sendiri, 23 SMA dan delapan SMK akan menggunakan sistem online.(Antara)